



## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SOSIAL DALAM PENDIDIKAN: ANALISIS KONSEPTUAL AKSESIBILITAS PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA

Erniati<sup>1</sup> ([erniati246@yahoo.co.id](mailto:erniati246@yahoo.co.id)), Muslim<sup>2</sup> ([muslim\\_161194@yahoo.com](mailto:muslim_161194@yahoo.com)), Ihsan<sup>3</sup> ([ihsan.1111@yahoo.com](mailto:ihsan.1111@yahoo.com))

<sup>1</sup>STIKIP Bantul Yogyakarta, DIY, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Negeri Yogyakarta, DIY Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

Correspondent Email: [erniati246@yahoo.co.id](mailto:erniati246@yahoo.co.id)

**ABSTRACT.** *This study analyses the implementation of social policy in education by focusing on educational accessibility and inclusive education as complementary dimensions for achieving educational equity in Indonesia. A qualitative library research approach was employed. Data were collected from journal articles, academic books, and policy documents retrieved through Scopus, ScienceDirect, Google Scholar, and Semantic Scholar, with ResearchGate used to access full text articles. Data were analysed using content analysis supported by bibliometric mapping. The findings indicate that social policy functions as a structural instrument for reducing educational inequality through educational accessibility and inclusive education. However, implementation remains constrained by operational regulations, infrastructure, teacher competence, and inclusive school culture. Bibliometric analysis reveals a shift from normative to empirical studies emphasising learning practices, teachers' roles, learners' experiences, and implementation barriers. This study contributes a conceptual synthesis integrating educational accessibility and inclusive education within the framework of social policy implementation.*

**Keywords:** *Social policy, Policy implementation, Educational accessibility, Inclusive education, Educational equity.*

**ABSTRAK.** Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan sosial dalam pendidikan dengan fokus pada aksesibilitas pendidikan dan pendidikan inklusif sebagai dua dimensi yang saling melengkapi dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari artikel ilmiah, buku akademik, dan dokumen kebijakan yang ditelusuri melalui Scopus, ScienceDirect, Google Scholar, dan Semantic Scholar, sedangkan ResearchGate digunakan untuk memperoleh artikel *full text*. Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi yang didukung pemetaan bibliometrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sosial berperan dalam mengurangi ketimpangan pendidikan, tetapi masih menghadapi kendala regulasi operasional, infrastruktur, kompetensi guru, dan budaya sekolah yang inklusif. Penelitian ini menghasilkan sintesis konseptual yang mengintegrasikan aksesibilitas pendidikan dan pendidikan inklusif sebagai kerangka implementasi kebijakan sosial untuk mendukung pemerataan pendidikan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Kebijakan Sosial, Implementasi Kebijakan, Aksesibilitas Pendidikan, Pendidikan Inklusif, Pemerataan Pendidikan.

### Article History

Received : 02-07-2026

Accepted : 08-07-2026

Revision : 07-07-2026

Published : 08-07-2026

How to cite: Erniati, E., Muslim, M., & Ihsan, I. (2026). *Implementasi kebijakan sosial dalam pendidikan: Analisis konseptual aksesibilitas pendidikan dan pendidikan inklusif di Indonesia*. Journal in Teaching and Education Area, 3 (2), 324-349. Doi: <https://doi.org/10.69673/2t5y2389>

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam pembangunan manusia sekaligus hak dasar setiap warga negara yang berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya



manusia, memperkuat daya saing bangsa, dan mendorong terwujudnya kesejahteraan sosial. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperluas kapabilitas individu, meningkatkan mobilitas sosial, mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi, serta menciptakan kesempatan yang lebih setara bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab negara melalui kebijakan yang menjamin pemerataan akses, peningkatan mutu, dan keadilan pendidikan bagi seluruh warga negara (Chankseliani & McCowan, 2021; Madani, 2019; Michopoulou, 2025; Mintarsih et al., 2022; Tawa, 2019; Ticona Machaca et al., 2025; Wirata, 2022).

Meskipun berbagai negara telah menunjukkan bahwa perluasan akses pendidikan mampu meningkatkan mobilitas sosial antargenerasi dan memperkuat peluang memperoleh pekerjaan yang lebih baik, berbagai penelitian juga menegaskan bahwa pendidikan tidak secara otomatis mampu mengurangi kemiskinan maupun ketimpangan apabila masih terdapat kesenjangan sosial, ekonomi, dan distribusi layanan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya akses pendidikan, tetapi juga oleh efektivitas kebijakan publik dalam menjamin pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat (Brown & James, 2020; Leng, 2025; Li & Zhang, 2025; Mandahu, 2025; Valdivia-Vizarreta et al., 2025).

Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan untuk menjamin hak setiap warga negara memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai regulasi di bidang pendidikan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan mutu layanan, memperkuat pemerataan kesempatan belajar, serta memenuhi hak pendidikan bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Berbagai kajian juga menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab negara dalam menyediakan layanan pendidikan yang setara, inklusif, terjangkau, dan bermutu sebagai bagian dari implementasi kebijakan sosial (Chairudin, 2023; Hafidati, 2020; Jung & Jung, 2022; Michopoulou, 2025; Mintarsih et al., 2022; Wahyunengseh, 2011).

Namun demikian, implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi pemerataan layanan pendidikan. Ketimpangan



akses antar wilayah, keterbatasan sarana dan prasarana, distribusi tenaga pendidik yang belum merata, kapasitas sekolah yang berbeda, serta kondisi social ekonomi masyarakat masih menjadi hambatan dalam mewujudkan pendidikan yang berkeadilan. Karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan juga menyebabkan distribusi layanan pendidikan belum sepenuhnya merata sehingga kualitas pendidikan di sejumlah wilayah tertinggal masih berada di bawah wilayah perkotaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan regulasi, melainkan pada efektivitas implementasi kebijakan dalam menjawab berbagai tantangan di lapangan ((K. Anwar, 2022; Bangkara et al., 2022; Hafidati, 2020; Luthfi et al., 2025; Nur Asyikin et al., 2025; R Madhakomala et al., 2025; Todapa, 2024; Widiastuti, 2025).

Permasalahan implementasi kebijakan tersebut semakin terlihat pada upaya mewujudkan aksesibilitas pendidikan dan pendidikan inklusif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan akses pendidikan masih terjadi terutama di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal, sementara penyelenggaraan pendidikan inklusif masih menghadapi keterbatasan kompetensi guru, kurangnya guru pendamping khusus, minimnya sarana pendukung, keterbatasan infrastruktur, serta belum optimalnya implementasi kurikulum yang mampu mengakomodasi keberagaman kebutuhan peserta didik. Di beberapa daerah, seperti Kabupaten Wonosobo, rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS), faktor ekonomi, kondisi geografis, serta lemahnya kapasitas pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan semakin memperlihatkan bahwa pemerataan pendidikan belum sepenuhnya tercapai. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang telah tersedia masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi agar tujuan pemerataan pendidikan dapat diwujudkan secara lebih efektif (Adiwidjaja et al., 2024; K. Anwar, 2022; Ediyanto et al., 2024; Genovesi et al., 2024; Hafidati, 2020; Ibourk & Raoui, 2024; Marsetyo & Nurhadi, 2021; Muhamad & Rajab, 2025; Nurjannah et al., 2023; Salehuddin et al., 2023; Syam & Fuadi, 2023).

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memperluas akses pendidikan dan memperkuat penyelenggaraan pendidikan inklusif, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasinya belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan pemerataan pendidikan. Kebijakan pendidikan dipandang sebagai instrumen utama dalam menjamin hak memperoleh pendidikan, meningkatkan akses layanan, serta memperkuat kualitas pendidikan nasional. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih dipengaruhi



oleh berbagai faktor, seperti kapasitas kelembagaan, kesiapan satuan pendidikan, ketersediaan sumber daya, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan secara konsisten di berbagai wilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya di tingkat pelaksana (K. Anwar, 2022; Chairudin, 2023; Tawa, 2019).

Berbagai penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa implementasi aksesibilitas pendidikan dan pendidikan inklusif masih menghadapi beragam kendala. Kajian mengenai aksesibilitas pendidikan umumnya berfokus pada pemenuhan hak pendidikan, perluasan kesempatan belajar, penyediaan fasilitas, dan pengurangan hambatan bagi kelompok tertentu. Di sisi lain, penelitian mengenai pendidikan inklusif lebih banyak menitikberatkan pada kompetensi guru, budaya sekolah, kurikulum, fasilitas pendukung, serta pengalaman peserta didik berkebutuhan khusus. Berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan implementasi masih meliputi keterbatasan fasilitas, kompetensi guru, budaya sekolah, serta kesenjangan pelaksanaan kebijakan pada tingkat satuan pendidikan (K. Anwar, 2022; Chairudin, 2023; Khoirin Nisa' et al., 2024; Rini & Azizah, 2024; Salehuddin et al., 2023; Syamsiyah & Rizal, 2023; Tawa, 2019).

Meskipun demikian, hasil telaah terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai aksesibilitas pendidikan dan pendidikan inklusif masih berkembang secara terpisah. Penelitian mengenai aksesibilitas pendidikan lebih menekankan pada aspek pemerataan akses dan pemenuhan hak pendidikan, sedangkan penelitian pendidikan inklusif lebih berorientasi pada proses pembelajaran, layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, serta kesiapan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusif. Akibatnya, masih terbatas penelitian yang mengintegrasikan kedua aspek tersebut dalam perspektif implementasi kebijakan sosial sebagai kerangka konseptual untuk menjelaskan bagaimana kebijakan pendidikan diimplementasikan dalam mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkeadilan. Kesenjangan inilah yang menunjukkan bahwa hubungan antara kebijakan sosial, aksesibilitas pendidikan, dan pendidikan inklusif masih memerlukan kajian yang lebih komprehensif (K. Anwar, 2022; Khoirin Nisa' et al., 2024; Rini & Azizah, 2024; Salehuddin et al., 2023).

Hasil analisis bibliometrik menggunakan *Dimensions.ai* dan *VOSviewer* semakin memperkuat adanya kesenjangan penelitian tersebut. Analisis menunjukkan bahwa



publikasi mengenai pendidikan inklusif di Indonesia terus meningkat, namun tema penelitian masih didominasi oleh kebutuhan peserta didik, guru, sekolah inklusif, kurikulum, fasilitas, infrastruktur, serta implementasi kebijakan pemerintah. Sementara itu, kajian yang mengintegrasikan implementasi kebijakan sosial dengan aksesibilitas pendidikan dan pendidikan inklusif dalam satu kerangka konseptual masih relatif terbatas. Temuan ini menunjukkan bahwa masih tersedia ruang pengembangan konseptual untuk menjelaskan implementasi kebijakan pendidikan secara lebih komprehensif dalam mendukung pemerataan pendidikan di Indonesia (Dianastiti et al., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena berbagai kebijakan pendidikan yang telah diterbitkan pemerintah belum sepenuhnya mampu mengatasi kesenjangan akses pendidikan, ketimpangan layanan antarwilayah, serta berbagai kendala dalam implementasi pendidikan inklusif. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya mendeskripsikan aksesibilitas pendidikan maupun pendidikan inklusif secara terpisah, tetapi juga menjelaskan keterkaitan keduanya dalam perspektif implementasi kebijakan sosial. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan dasar konseptual bagi penguatan implementasi kebijakan pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, responsif, dan berorientasi pada pemerataan pendidikan (K. Anwar, 2022; Chairudin, 2023; Hafidati, 2020).

Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan sintesis konseptual yang mengintegrasikan aksesibilitas pendidikan dan pendidikan inklusif sebagai dua instrumen utama implementasi kebijakan sosial dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung membahas kedua aspek tersebut secara parsial, penelitian ini memosisikan aksesibilitas pendidikan dan pendidikan inklusif sebagai komponen yang saling berkaitan dalam menjelaskan hubungan antara kebijakan sosial, pemenuhan hak pendidikan, dan pemerataan pendidikan. Integrasi tersebut menghasilkan kerangka konseptual yang lebih komprehensif untuk mendukung pengembangan implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia (K. Anwar, 2022; Dianastiti et al., 2024; Khoirin Nisa' et al., 2024).

Berdasarkan fenomena ketimpangan akses pendidikan, berbagai kendala dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, serta belum optimalnya implementasi kebijakan pendidikan di berbagai daerah, diperlukan suatu kajian yang mampu menjelaskan bagaimana kebijakan sosial di bidang pendidikan diimplementasikan dalam mewujudkan



pemerataan pendidikan. Penelitian ini menjadi penting karena permasalahan pendidikan di Indonesia tidak lagi terletak pada terbatasnya regulasi, melainkan pada efektivitas implementasi kebijakan dalam menjamin akses pendidikan yang setara, layanan pendidikan yang inklusif, serta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan implementasi kebijakan sosial sekaligus menjadi dasar akademik bagi perumusan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkeadilan (K. Anwar, 2022; Chairudin, 2023; Hafidati, 2020).

Berangkat dari kondisi tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan sintesis konseptual yang mengintegrasikan aksesibilitas pendidikan dan pendidikan inklusif ke dalam perspektif implementasi kebijakan sosial sebagai satu kesatuan analisis. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya membahas kedua aspek tersebut secara terpisah, penelitian ini menempatkan aksesibilitas pendidikan dan pendidikan inklusif sebagai dua dimensi yang saling berkaitan dalam menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan sosial berkontribusi terhadap terwujudnya pemerataan pendidikan di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan teori implementasi kebijakan pendidikan sekaligus memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam menjelaskan hubungan antara kebijakan sosial, pemenuhan hak pendidikan, dan pemerataan pendidikan (K. Anwar, 2022; Dianastiti et al., 2024; Khoirin Nisa' et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan sosial di bidang pendidikan melalui kajian mengenai aksesibilitas pendidikan dan pendidikan inklusif sebagai instrumen utama dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan menjelaskan keterkaitan antara implementasi kebijakan sosial, pemenuhan hak atas pendidikan, dan penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagai dasar konseptual bagi penguatan implementasi kebijakan pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan sosial di bidang pendidikan melalui analisis berbagai konsep, kebijakan, dan hasil penelitian yang telah dipublikasikan.



Penelitian berlandaskan paradigma postpositivisme yang menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam menginterpretasikan berbagai sumber data secara sistematis, kritis, dan kontekstual (Sugiyono, 2022).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari artikel ilmiah, buku akademik, peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pemerintah, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan implementasi kebijakan sosial, aksesibilitas pendidikan, dan pendidikan inklusif. Artikel ilmiah diperoleh melalui basis data Scopus dan ScienceDirect, serta mesin pencari akademik Google Scholar dan Semantic Scholar. ResearchGate dimanfaatkan sebagai sumber tambahan untuk memperoleh naskah lengkap (*full text*) dari artikel yang relevan. Literatur dibatasi pada publikasi tahun 2019-2025 untuk menggambarkan perkembangan kajian mutakhir mengenai implementasi kebijakan sosial di bidang pendidikan.

Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis menggunakan kombinasi kata kunci dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yaitu *social policy*, *education policy*, *educational accessibility*, *inclusive education*, *educational equity*, *kebijakan sosial*, *kebijakan pendidikan*, *aksesibilitas pendidikan*, dan *pendidikan inklusif*. Seluruh hasil penelusuran diseleksi berdasarkan relevansi dengan tujuan penelitian, rentang tahun publikasi, ketersediaan naskah lengkap (*full text*), serta kesesuaian dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Hasil penelusuran awal memperoleh 50 artikel yang relevan. Selanjutnya dilakukan proses seleksi berdasarkan kesesuaian topik, ketersediaan *full text*, keterkaitan dengan fokus penelitian, serta penghapusan artikel yang memiliki substansi serupa atau tidak membahas implementasi kebijakan sosial di bidang pendidikan. Berdasarkan proses tersebut, 30 artikel memenuhi kriteria dan digunakan sebagai sumber utama dalam proses analisis. Selain artikel ilmiah tersebut, penelitian ini juga menggunakan buku akademik, regulasi pemerintah, dan dokumen kebijakan sebagai referensi pendukung dalam menyusun sintesis konseptual.

**Tabel 1.** Kriteria Seleksi Literatur

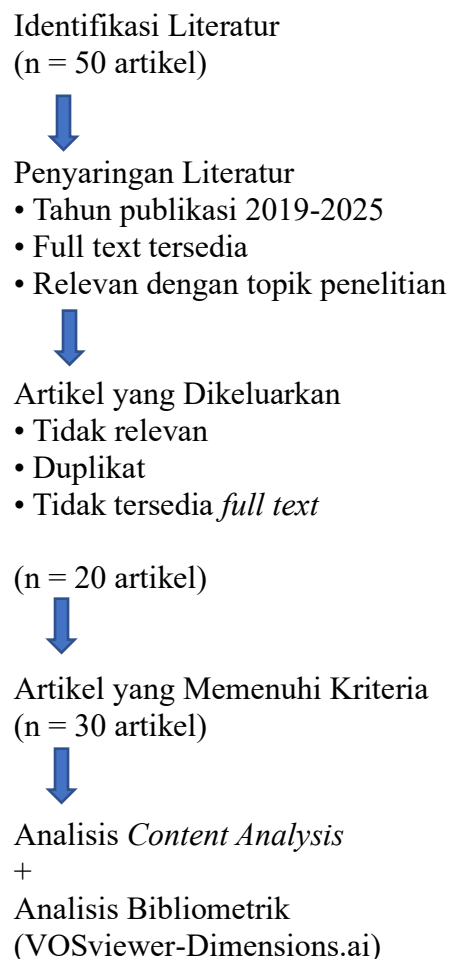
| Aspek                  | Kriteria Inklusi                                                                          | Kriteria Eksklusi                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Jenis publikasi</b> | Artikel ilmiah pada jurnal nasional dan internasional                                     | Prosiding, editorial, berita, opini, dan dokumen non-ilmiah |
| <b>Topik</b>           | Implementasi kebijakan sosial, kebijakan pendidikan, aksesibilitas pendidikan, pendidikan | Artikel yang tidak berkaitan langsung                       |



|                         |                                                                                  |                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                         | inklusif, dan pemerataan pendidikan                                              | dengan fokus penelitian                                                |
| <b>Tahun publikasi</b>  | 2019-2025                                                                        | Terbit sebelum tahun 2019                                              |
| <b>Sumber data</b>      | <i>Scopus, ScienceDirect, Google Scholar, Semantic Scholar, dan ResearchGate</i> | Publikasi yang tidak dapat diakses secara lengkap ( <i>full text</i> ) |
| <b>Kualitas artikel</b> | Artikel yang memiliki relevansi konseptual dengan tujuan penelitian              | Artikel duplikat atau memiliki substansi yang sama                     |

Proses seleksi literatur dilakukan secara bertahap melalui identifikasi, penyaringan, dan penilaian kelayakan artikel. Tahap identifikasi menghasilkan **50 artikel** yang diperoleh dari berbagai basis data ilmiah. Selanjutnya dilakukan penyaringan berdasarkan kesesuaian topik, rentang tahun publikasi, ketersediaan naskah lengkap (*full text*), serta relevansi terhadap fokus penelitian. Setelah proses seleksi selesai, **30 artikel** memenuhi seluruh kriteria dan digunakan sebagai sumber utama dalam proses analisis.

#### Diagram 1. Alur Seleksi Literatur





Sebagai penguatan analisis, penelitian ini juga memanfaatkan kajian bibliometrik menggunakan metadata dari Dimensions.ai yang divisualisasikan melalui aplikasi *VOSviewer*. Analisis bibliometrik digunakan untuk mengidentifikasi perkembangan tren penelitian, hubungan antartopik (*network visualization*), perkembangan tema penelitian (*overlay visualization*), serta kepadatan tema (*density visualization*). Hasil analisis bibliometrik tidak dijadikan sebagai sumber data utama penelitian, melainkan sebagai data pendukung untuk memperkuat interpretasi hasil *library research* mengenai aksesibilitas pendidikan dan pendidikan inklusif di Indonesia.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik *content analysis*. Tahap analisis meliputi: (1) membaca secara menyeluruh seluruh literatur yang telah memenuhi kriteria seleksi; (2) melakukan reduksi data dengan mengidentifikasi informasi yang relevan dengan fokus penelitian; (3) melakukan pengkodean (*coding*) dan mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema utama yang meliputi implementasi kebijakan sosial, aksesibilitas pendidikan, pendidikan inklusif, dan pemerataan pendidikan; (4) melakukan sintesis serta interpretasi terhadap hasil penelitian terdahulu dengan membandingkan persamaan, perbedaan, dan kecenderungan temuan; serta (5) menarik kesimpulan untuk menyusun sintesis konseptual mengenai implementasi kebijakan sosial di bidang pendidikan.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang berasal dari artikel ilmiah, buku akademik, regulasi pemerintah, dan dokumen kebijakan yang relevan. Selain itu, interpretasi dilakukan secara sistematis dengan menghubungkan berbagai konsep dan temuan penelitian sehingga menghasilkan sintesis yang konsisten, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Sugiyono, 2022).

## **HASIL**

### **Konsep Kebijakan Sosial Dalam Pendidikan**

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa konsep kebijakan sosial dalam pendidikan terdiri atas dua konsep utama, yaitu kebijakan dan sosial, yang saling terintegrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan dipahami sebagai prinsip, arah tindakan, keputusan, strategi, dan program yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu melalui proses pengambilan keputusan yang terencana. Dalam konteks pendidikan, kebijakan berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pengelolaan sumber daya,



pelaksanaan program, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan (Tintington et al., 2023; Wirata, 2022).

Kajian juga menunjukkan bahwa konsep sosial memiliki ruang lingkup yang luas, meliputi berbagai sektor pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hukum, budaya, dan pelayanan sosial. Dalam perspektif kebijakan publik, kebijakan sosial diarahkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang berkualitas. Pada sektor pendidikan, kebijakan sosial berfungsi menjamin pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu layanan pendidikan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan agar memperoleh kesempatan belajar yang setara (Wahyunengseh, 2011; Wirata, 2022).

Hasil sintesis literatur memperlihatkan adanya perkembangan konsep kebijakan sosial dalam pendidikan. Perkembangan tersebut ditandai dengan pergeseran orientasi dari pendekatan yang menitikberatkan pada administrasi pemerintahan menuju pendekatan yang lebih menekankan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan sistem pendidikan yang inklusif, aksesibel, dan berkeadilan. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sosial tidak hanya dipahami sebagai penyediaan layanan pendidikan, tetapi juga sebagai upaya mengurangi ketimpangan sosial melalui pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan (K. Anwar, 2022; Wahyunengseh, 2011; Wirata, 2022).

**Tabel 2.** Sintesis Hasil Penelitian Konsep Kebijakan Sosial dalam Pendidikan

| Aspek                             | Temuan Hasil Penelitian                                                                                               | Sumber                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Konsep kebijakan                  | Kebijakan merupakan prinsip, keputusan, strategi, dan program yang menjadi pedoman dalam mencapai tujuan pembangunan. | Wirata (2022); Tintington et al. (2023)                |
| Konsep social                     | Kebijakan sosial mencakup berbagai sektor pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.               | Wahyunengseh (2011); Wirata (2022)                     |
| Kebijakan sosial dalam pendidikan | Berfungsi menjamin pemerataan akses, peningkatan mutu pendidikan, dan perlindungan kelompok rentan.                   | Wahyunengseh (2011); Wirata (2022)                     |
| Perkembangan konsep               | Bergeser dari pendekatan administratif menuju pendidikan yang inklusif, aksesibel, dan berkeadilan.                   | M. S. Anwar (2022); Wahyunengseh (2011); Wirata (2022) |



### **Implementasi Kebijakan Sosial Melalui Aksesibilitas Pendidikan**

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa aksesibilitas pendidikan merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan sosial yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan secara setara tanpa diskriminasi. Dalam perspektif kebijakan sosial, aksesibilitas tidak hanya dimaknai sebagai kemudahan memasuki lembaga pendidikan, tetapi juga mencakup penyediaan berbagai dukungan yang memungkinkan seluruh peserta didik, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh kesempatan belajar yang sama. Dengan demikian, aksesibilitas menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerataan pendidikan sekaligus mengurangi kesenjangan sosial melalui penyediaan layanan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan (Rengganis & Purbaningrum, 2024; Wirata, 2022).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aksesibilitas pendidikan memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta berbagai regulasi turunannya. Regulasi tersebut memberikan jaminan terhadap hak penyandang disabilitas untuk memperoleh akses terhadap fasilitas pendidikan, akomodasi yang layak, serta kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan pendidikan. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sosial telah memiliki dasar normatif yang memadai dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang lebih inklusif (Syamsiyah & Rizal, 2023).

Meskipun demikian, hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa implementasi regulasi belum sepenuhnya berjalan optimal pada tingkat satuan pendidikan. Berbagai penelitian mengidentifikasi masih adanya keterbatasan fasilitas yang ramah disabilitas, pelayanan akademik yang adaptif, sistem pendukung pembelajaran, serta kesiapan kelembagaan dalam memenuhi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dengan implementasi operasional di lapangan (Syamsiyah & Rizal, 2023).

Kajian pustaka juga mengidentifikasi tiga dimensi utama aksesibilitas pendidikan. Dimensi pertama adalah aspek regulasi yang mencakup kebijakan, standar pelayanan, dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Dimensi kedua meliputi penyediaan sarana, prasarana, teknologi, informasi, dan komunikasi yang mendukung proses pembelajaran. Dimensi ketiga berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia, khususnya tenaga

pendidik dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan yang menghargai keberagaman peserta didik (Syamsiyah & Rizal, 2023).

Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi aksesibilitas pendidikan masih menunjukkan variasi antarlembaga pendidikan. Sebagian sekolah dan perguruan tinggi telah menyediakan fasilitas sesuai amanat regulasi, namun sebagian lainnya masih menghadapi keterbatasan sumber daya, pendanaan, serta kesiapan kelembagaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan akses pendidikan masih menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan sosial di Indonesia ( K. Anwar, 2022, 2022 Syamsiyah & Rizal).

**Tabel 3.** Sintesis Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Sosial melalui Aksesibilitas Pendidikan

| Dimensi                      | Temuan Penelitian                                                                                          | Referensi                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Regulasi</b>              | Landasan hukum aksesibilitas pendidikan telah tersedia melalui UU No. 8 Tahun 2016 dan regulasi pendukung. | Syamsiyah & Rizal (2023)                     |
| <b>Infrastruktur</b>         | Penyediaan fasilitas ramah disabilitas mulai berkembang, tetapi belum merata.                              | Syamsiyah & Rizal (2023)                     |
| <b>Teknologi dan layanan</b> | Dukungan teknologi, informasi, dan pelayanan akademik menjadi bagian penting aksesibilitas.                | Syamsiyah & Rizal (2023)                     |
| <b>SDM</b>                   | Kompetensi tenaga pendidik berperan dalam keberhasilan implementasi aksesibilitas.                         | Syamsiyah & Rizal (2023)                     |
| <b>Implementasi</b>          | Masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan di tingkat satuan pendidikan.                   | M. S. Anwar (2022); Syamsiyah & Rizal (2023) |

**Tabel 4.** Kendala Implementasi Aksesibilitas Pendidikan

| Aspek                | Temuan                                                                            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Regulatif</b>     | Implementasi kebijakan belum sepenuhnya operasional di seluruh satuan pendidikan. |
| <b>Infrastruktur</b> | Fasilitas ramah disabilitas belum tersedia secara merata.                         |
| <b>Pelayanan</b>     | Layanan akademik adaptif masih terbatas.                                          |
| <b>Kelembagaan</b>   | Kesiapan institusi pendidikan masih beragam.                                      |
| <b>SDM</b>           | Kompetensi tenaga pendidik belum merata.                                          |

### Implementasi Kebijakan Sosial Melalui Pendidikan Inklusif

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa pendidikan inklusif merupakan implementasi kebijakan sosial yang bertujuan mewujudkan sistem pendidikan yang berkeadilan melalui pemberian kesempatan belajar yang setara bagi seluruh peserta didik tanpa membedakan



kondisi fisik, intelektual, sosial, ekonomi, maupun latar belakang budaya. Dalam perspektif kebijakan sosial, pendidikan inklusif menjadi instrumen strategis untuk menjamin pemenuhan hak pendidikan, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keberagaman (Chairudin, 2023; Wahyunengseh, 2011; Wirata, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan regulasi yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui penyediaan guru, kurikulum, layanan pendampingan, serta pengembangan sekolah inklusif sebagai bagian dari implementasi kebijakan sosial (Justin Niaga Siman Juntak, Alfredo Rynaldi, Eka Sukmawati & Sukomardojo, 2023; Salehuddin et al., 2023).

Meskipun demikian, sintesis berbagai penelitian memperlihatkan bahwa implementasi pendidikan inklusif masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan kompetensi guru, belum optimalnya modifikasi kurikulum, kurangnya guru pendamping khusus, serta belum meratanya penyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dengan implementasi pada tingkat satuan pendidikan (Justin Niaga Siman Juntak, Alfredo Rynaldi, Eka Sukmawati & Sukomardojo, 2023; Nurjannah et al., 2023).

Hasil analisis bibliometrik menunjukkan bahwa penelitian mengenai pendidikan inklusif di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. *Network visualization* memperlihatkan keterhubungan yang kuat antara kata kunci *inclusive school*, *teacher*, *children*, *special needs*, *education*, *methods*, dan *obstacles*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa fokus penelitian berkembang dari pembahasan konseptual menuju implementasi pembelajaran, kesiapan guru, strategi pedagogis, dan berbagai hambatan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.

Analisis *overlay visualization* menunjukkan bahwa kata kunci *participants*, *disability*, *effects*, dan *obstacles* merupakan tema yang relatif baru dibandingkan *policy*, *government*, dan *concept*. Temuan ini mengindikasikan adanya pergeseran fokus penelitian dari kajian normatif menuju kajian empiris yang menekankan pengalaman peserta didik, efektivitas



pembelajaran, interaksi sosial, dan implementasi kebijakan pendidikan inklusif (Rini & Azizah, 2024).

Selain itu, hasil bibliometrik memperlihatkan bahwa kata kunci *teacher*, *inclusive school*, *methods*, dan *children* memiliki tingkat keterhubungan yang tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa guru menjadi aktor utama dalam implementasi pendidikan inklusif, baik sebagai fasilitator pembelajaran maupun sebagai agen perubahan dalam membangun lingkungan belajar yang menghargai keberagaman peserta didik (Justin Niaga Siman Juntak, Alfredo Rynaldi, Eka Sukmawati & Sukomardojo, 2023; Salehuddin et al., 2023).

Hasil kajian pustaka juga menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif dipengaruhi oleh terbentuknya budaya sekolah yang inklusif (*culture of inclusion*). Kepemimpinan sekolah, kolaborasi antarguru, keterlibatan orang tua, supervisi, serta penerapan *Positive Behaviour Support* menjadi faktor yang mendukung keberhasilan implementasi pendidikan inklusif. Sebaliknya, berbagai penelitian masih menemukan hambatan berupa stigma sosial, diskriminasi, isolasi sosial, dan perundungan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus (Khoirin Nisa' et al., 2024; Rini & Azizah, 2024).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sosial melalui pendidikan inklusif telah berkembang dari sisi regulasi, namun masih menghadapi tantangan pada aspek operasional, pedagogis, kelembagaan, dan budaya sekolah. Sintesis literatur dan analisis bibliometrik memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas implementasi memerlukan penguatan kompetensi guru, adaptasi kurikulum, penyediaan layanan yang aksesibel, serta pengembangan budaya sekolah yang inklusif (Chairudin, 2023; Salehuddin et al., 2023; Wahyunengseh, 2011).

**Tabel 5.** Sintesis Hasil Penelitian Implementasi Pendidikan Inklusif

| Aspek                       | Temuan Penelitian                                                                      | Referensi                                                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Regulasi</b>             | Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. | Justin Niaga Siman Juntak et al. (2023); Salehuddin et al. (2023) |
| <b>Guru</b>                 | Kompetensi guru menjadi faktor utama keberhasilan implementasi.                        | Salehuddin et al. (2023)                                          |
| <b>Kurikulum</b>            | Modifikasi kurikulum belum optimal.                                                    | Nurjannah et al. (2023)                                           |
| <b>Sarana dan prasarana</b> | Penyediaan fasilitas pendukung belum merata.                                           | Justin Niaga Siman Juntak et al. (2023)                           |
| <b>Budaya sekolah</b>       | <i>Culture of inclusion</i> mendukung keberhasilan implementasi.                       | Khoirin Nisa' et al. (2024)                                       |
| <b>Hambatan</b>             | Masih terdapat stigma sosial, diskriminasi, isolasi sosial, dan perundungan.           | Rini & Azizah (2024)                                              |



**Tabel 6.** Sintesis Hasil Analisis Bibliometrik Pendidikan Inklusif di Indonesia

| Analisis                     | Temuan                                                                                                                          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Network visualization</b> | Kata kunci <i>inclusive school, teacher, children, special needs, methods, dan obstacles</i> memiliki keterhubungan yang kuat.  |
| <b>Overlay visualization</b> | Terjadi pergeseran penelitian dari tema <i>policy</i> menuju <i>participants, disability, effects, dan obstacles</i> .          |
| <b>Tren penelitian</b>       | Fokus penelitian bergeser dari kajian normatif menuju kajian empiris mengenai implementasi pendidikan inklusif.                 |
| <b>Implikasi</b>             | Penelitian terkini lebih menekankan praktik pembelajaran, pengalaman peserta didik, kompetensi guru, dan hambatan implementasi. |

### **Sintesis Implementasi Kebijakan Sosial dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan**

Hasil sintesis kajian pustaka menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sosial dalam pendidikan di Indonesia dibangun melalui dua dimensi utama, yaitu aksesibilitas pendidikan dan pendidikan inklusif. Kedua dimensi tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkeadilan. Aksesibilitas pendidikan berorientasi pada pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan melalui penyediaan regulasi, sarana prasarana, layanan pendukung, serta kemudahan akses terhadap pendidikan. Sementara itu, pendidikan inklusif menekankan penerimaan terhadap keberagaman peserta didik melalui penyelenggaraan pembelajaran yang adaptif, lingkungan belajar yang inklusif, serta penguatan budaya sekolah yang menghargai perbedaan (Salehuddin et al., 2023; Syamsiyah & Rizal, 2023; Wirata, 2022). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sosial tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, dukungan kelembagaan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta budaya organisasi sekolah. Berbagai penelitian yang dianalisis memperlihatkan bahwa kelemahan pada salah satu aspek tersebut akan memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan dalam mewujudkan pemerataan pendidikan (Justin Niaga Siman Juntak, Alfredo Rynaldi, Eka Sukmawati & Sukomardojo, 2023; Khoirin Nisa' et al., 2024; Nurjannah et al., 2023). Selain itu, hasil analisis bibliometrik menunjukkan adanya perubahan arah penelitian mengenai kebijakan sosial dalam pendidikan. Kajian yang sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek normatif kini berkembang menuju penelitian empiris yang menekankan implementasi kebijakan, praktik pembelajaran, pengalaman peserta didik, kompetensi guru, serta berbagai hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sosial semakin dipahami



sebagai proses multidimensional yang melibatkan aspek regulasi, pedagogi, budaya sekolah, dan tata kelola pendidikan secara terpadu (Rini & Azizah, 2024).

Secara keseluruhan, hasil sintesis menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sosial dalam mewujudkan pemerataan pendidikan memerlukan integrasi antara aksesibilitas pendidikan, pendidikan inklusif, kompetensi tenaga pendidik, dukungan kelembagaan, dan budaya sekolah. Integrasi tersebut menjadi dasar konseptual dalam membangun sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia (Chairudin, 2023; Salehuddin et al., 2023; Wahyunengseh, 2011).

**Tabel 7.** Sintesis Implementasi Kebijakan Sosial dalam Pemerataan Pendidikan di Indonesia

| Dimensi                         | Temuan Penelitian                                                                              | Analisis Sintesis                                                                              | Referensi                                                         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Aksesibilitas Pendidikan</b> | Menjamin hak memperoleh layanan pendidikan melalui regulasi, fasilitas, dan layanan pendukung. | Menjadi dasar pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh warga negara.                         | Syamsiyah & Rizal (2023); Wirata (2022)                           |
| <b>Pendidikan Inklusif</b>      | Mengembangkan sistem pembelajaran yang menerima keberagaman peserta didik.                     | Memastikan seluruh peserta didik memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi.             | Salehuddin et al. (2023); Chairudin (2023)                        |
| <b>Kompetensi Guru</b>          | Guru berperan dalam pelaksanaan pembelajaran yang adaptif dan inklusif.                        | Menentukan efektivitas implementasi kebijakan sosial di sekolah.                               | Justin Niaga Siman Juntak et al. (2023); Salehuddin et al. (2023) |
| <b>Budaya Sekolah</b>           | Budaya sekolah yang inklusif mendukung keberhasilan implementasi pendidikan inklusif.          | Memperkuat penerimaan terhadap keberagaman dan meningkatkan partisipasi peserta didik.         | Khoirin Nisa' et al. (2024)                                       |
| <b>Pemerataan Pendidikan</b>    | Implementasi kebijakan sosial diarahkan pada terciptanya pendidikan yang adil dan setara.      | Pemerataan pendidikan dicapai melalui integrasi seluruh dimensi implementasi kebijakan sosial. | Wahyunengseh (2011); Wirata (2022); M. S. Anwar (2022)            |

**Sumber:** Disusun penulis berdasarkan Wahyunengseh (2011); M. S. Anwar (2022); Wirata (2022); Syamsiyah & Rizal (2023); Chairudin (2023); Justin Niaga Siman Juntak et al. (2023); Salehuddin et al. (2023); Nurjannah et al. (2023); Khoirin Nisa' et al. (2024); dan Rini & Azizah (2024).



## **PEMBAHASAN**

### ***Konsep Kebijakan Sosial Sebagai Landasan Implementasi Pendidikan Yang Berkeadilan***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sosial dalam pendidikan mengalami perkembangan konseptual yang signifikan. Pergeseran dari pendekatan administratif menuju pendekatan kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa pendidikan semakin diposisikan sebagai instrumen pembangunan sosial yang bertujuan mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan tidak lagi hanya diukur dari tersusunnya regulasi, tetapi juga dari efektivitas implementasinya dalam menciptakan layanan pendidikan yang adil dan merata (K. Anwar, 2022; Wahyunengseh, 2011; Wirata, 2022).

Dalam perspektif implementasi kebijakan, hasil sintesis ini memperlihatkan bahwa pendidikan memiliki fungsi strategis sebagai bagian dari kebijakan sosial yang menjamin pemenuhan hak dasar warga negara. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sosial harus dipahami sebagai proses yang mengintegrasikan aspek regulasi, tata kelola, pelayanan publik, dan pemerataan akses pendidikan sehingga mampu menjawab berbagai tantangan ketimpangan pendidikan di Indonesia (Tintigon et al., 2023; Wahyunengseh, 2011; Wirata, 2022).

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kebijakan sosial menjadi fondasi bagi implementasi aksesibilitas pendidikan dan pendidikan inklusif. Kedua aspek tersebut merupakan bentuk konkret pelaksanaan kebijakan sosial dalam mewujudkan sistem pendidikan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemenuhan hak seluruh peserta didik tanpa diskriminasi (K. Anwar, 2022; Wirata, 2022).

### ***Implementasi Kebijakan Sosial Melalui Aksesibilitas Pendidikan***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas pendidikan merupakan implementasi nyata kebijakan sosial yang bertujuan mewujudkan pemerataan pendidikan. Temuan ini memperlihatkan bahwa aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga mencakup jaminan terhadap hak pendidikan, penyediaan layanan akademik, dukungan teknologi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan demikian, aksesibilitas merupakan prasyarat utama dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan (Rengganis & Purbaningrum, 2024; Wirata, 2022)



Meskipun Indonesia telah memiliki landasan regulasi yang kuat, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan dan kemampuan satuan pendidikan dalam menerjemahkan kebijakan menjadi praktik layanan pendidikan. Kesenjangan antara regulasi dan implementasi menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sosial tidak cukup diukur dari keberadaan aturan, tetapi harus dilihat dari kemampuan sistem pendidikan menyediakan layanan yang benar-benar dapat diakses oleh seluruh peserta didik tanpa diskriminasi (Syamsiyah & Rizal, 2023).

Temuan mengenai tiga dimensi aksesibilitas regulasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia menunjukkan bahwa ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan sosial. Kelemahan pada salah satu dimensi akan memengaruhi kualitas layanan pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sosial memerlukan integrasi antara penguatan regulasi, penyediaan fasilitas yang memadai, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik agar tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai secara berkelanjutan (K. Anwar, 2022; Syamsiyah & Rizal, 2023; Wirata, 2022).

### ***Implementasi Kebijakan Sosial Melalui Pendidikan Inklusif***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusif merupakan bentuk implementasi kebijakan sosial yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak pendidikan, tetapi juga pada penciptaan sistem pendidikan yang mampu mengakomodasi keberagaman peserta didik. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak cukup diukur dari keberadaan regulasi, melainkan dari kemampuan satuan pendidikan menerjemahkan kebijakan menjadi praktik pembelajaran yang inklusif dan berkeadilan (Chairudin, 2023; Wahyunengseh, 2011; Wirata, 2022).

Analisis bibliometrik memperlihatkan adanya perubahan orientasi penelitian dari kajian normatif menuju kajian empiris. Pergeseran ini menunjukkan bahwa perhatian akademik saat ini lebih difokuskan pada efektivitas implementasi, pengalaman peserta didik, strategi pembelajaran, serta berbagai hambatan yang dihadapi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Dengan demikian, kualitas implementasi menjadi indikator utama keberhasilan kebijakan sosial di bidang pendidikan (Rini & Azizah, 2024).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kompetensi guru merupakan faktor yang paling menentukan dalam implementasi pendidikan inklusif. Guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran, mediator sosial, sekaligus agen perubahan yang membangun



lingkungan belajar yang menghargai keberagaman. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan pedagogi inklusif, serta penguatan kemampuan adaptasi kurikulum menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan sosial (Nurjannah et al., 2023; Salehuddin et al., 2023). Selain kompetensi guru, budaya sekolah menjadi dimensi yang tidak terpisahkan dari keberhasilan implementasi pendidikan inklusif. Budaya sekolah yang mendukung kolaborasi, kepemimpinan inklusif, keterlibatan orang tua, dan penghargaan terhadap keberagaman akan memperkuat efektivitas kebijakan sosial dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, partisipatif, dan bebas diskriminasi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sosial memerlukan pendekatan yang bersifat holistik dengan mengintegrasikan regulasi, pedagogi, budaya organisasi, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan (Khoirin Nisa' et al., 2024; Rini & Azizah, 2024).

***Integrasi Aksesibilitas dan Pendidikan Inklusif sebagai Implementasi Kebijakan Sosial***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sosial dalam pendidikan tidak dapat dipahami sebagai pelaksanaan regulasi semata, tetapi merupakan proses yang melibatkan keterpaduan antara kebijakan, tata kelola, sumber daya manusia, budaya sekolah, dan praktik pembelajaran. Temuan ini menunjukkan bahwa aksesibilitas pendidikan dan pendidikan inklusif merupakan dua dimensi yang saling melengkapi dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Aksesibilitas memastikan terbukanya kesempatan memperoleh layanan pendidikan, sedangkan pendidikan inklusif menjamin bahwa layanan tersebut dapat diikuti secara bermakna oleh seluruh peserta didik tanpa diskriminasi (Salehuddin et al., 2023; Syamsiyah & Rizal, 2023).

Sintesis literatur dan analisis bibliometrik juga memperlihatkan adanya perubahan paradigma penelitian dari pendekatan normatif menuju pendekatan implementatif. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan sosial semakin dinilai berdasarkan kualitas pelaksanaannya di tingkat satuan pendidikan, bukan hanya berdasarkan keberadaan regulasi. Oleh karena itu, penguatan kompetensi guru, penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel, pengembangan budaya sekolah yang inklusif, serta dukungan kelembagaan menjadi faktor yang saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan sosial (Justin Niaga Siman Juntak, Alfredo Rynaldi, Eka Sukmawati & Sukomardojo, 2023; Khoirin Nisa' et al., 2024; Rini & Azizah, 2024).



Berdasarkan hasil sintesis, penelitian ini menegaskan bahwa pemerataan pendidikan di Indonesia memerlukan pendekatan yang bersifat integratif. Integrasi antara aksesibilitas pendidikan, pendidikan inklusif, kompetensi tenaga pendidik, dan budaya sekolah menjadi kerangka konseptual yang memperkuat implementasi kebijakan sosial. Temuan ini merupakan kontribusi konseptual penelitian dalam menjelaskan bahwa keberhasilan pemerataan pendidikan tidak ditentukan oleh satu aspek secara terpisah, tetapi oleh sinergi antardimensi implementasi kebijakan sosial yang bekerja secara berkelanjutan (K. Anwar, 2022; Wahyunengseh, 2011).

### ***Kontribusi Konseptual Penelitian Terhadap Implementasi Kebijakan Sosial dalam Pendidikan***

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sosial dalam pendidikan tidak dapat dipahami hanya sebagai pelaksanaan regulasi yang menjamin hak memperoleh pendidikan. Sebaliknya, implementasi kebijakan sosial merupakan proses multidimensional yang mengintegrasikan aspek regulasi, aksesibilitas pendidikan, pendidikan inklusif, kompetensi tenaga pendidik, dukungan kelembagaan, dan budaya sekolah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkeadilan (Salehuddin et al., 2023; Wahyunengseh, 2011; Wirata, 2022).

Hasil analisis bibliometrik memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan adanya perubahan orientasi penelitian dari pembahasan konseptual menuju kajian implementasi. Pergeseran ini memperlihatkan bahwa perhatian penelitian tidak lagi berfokus pada keberadaan kebijakan, tetapi pada efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam praktik pendidikan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan sosial ditentukan oleh kemampuan seluruh komponen pendidikan menerjemahkan regulasi menjadi layanan pendidikan yang inklusif, aksesibel, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik (Justin Niaga Siman Juntak, Alfredo Rynaldi, Eka Sukmawati & Sukomardojo, 2023; Rini & Azizah, 2024).

Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini menghasilkan kerangka konseptual yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan sosial dalam pendidikan merupakan hubungan yang saling memengaruhi antara aksesibilitas pendidikan, pendidikan inklusif, kompetensi guru, budaya sekolah, serta dukungan kebijakan pemerintah. Hubungan antardimensi tersebut membentuk suatu sistem implementasi yang secara bersama-sama berkontribusi



terhadap tercapainya pemerataan pendidikan yang berkeadilan di Indonesia (Chairudin, 2023; Khoirin Nisa' et al., 2024; Syamsiyah & Rizal, 2023).

Kontribusi konseptual penelitian ini memperluas pemahaman mengenai implementasi kebijakan sosial dengan menempatkan aksesibilitas pendidikan dan pendidikan inklusif sebagai dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sosial tidak cukup diukur dari aspek regulatif, tetapi juga dari integrasi aspek pedagogis, kelembagaan, dan budaya sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan.

**Tabel 7.** Kontribusi Konseptual Penelitian

| <b>Dimensi</b>                  | <b>Temuan Penelitian</b>                                                         | <b>Kontribusi Konseptual</b>                                              | <b>Referensi</b>                                                 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Regulasi</b>                 | Menjamin hak memperoleh pendidikan melalui kebijakan sosial.                     | Menjadi fondasi implementasi kebijakan pendidikan.                        | Wahyunengseh (2011); Wirata (2022)                               |
| <b>Aksesibilitas Pendidikan</b> | Menjamin kesempatan belajar yang setara melalui penyediaan layanan pendidikan.   | Memperkuat dimensi pemerataan pendidikan.                                 | Syamsiyah & Rizal (2023)                                         |
| <b>Pendidikan Inklusif</b>      | Menjamin seluruh peserta didik memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi. | Memperkuat dimensi keadilan sosial dalam pendidikan.                      | Salehuddin et al. (2023); Chairudin (2023)                       |
| <b>Kompetensi Guru</b>          | Menentukan kualitas implementasi pembelajaran inklusif.                          | Menjadi penghubung antara kebijakan dan praktik pendidikan.               | Justin Niaga Siman Juntak et al. (2023); Nurjannah et al. (2023) |
| <b>Budaya Sekolah</b>           | Mendukung terciptanya lingkungan belajar yang inklusif dan partisipatif.         | Memastikan keberlanjutan implementasi kebijakan sosial.                   | Khoirin Nisa' et al. (2024)                                      |
| <b>Pemerataan Pendidikan</b>    | Merupakan hasil integrasi seluruh dimensi implementasi kebijakan sosial.         | Menjadi luaran konseptual implementasi kebijakan sosial dalam pendidikan. | M. S. Anwar (2022); Wahyunengseh (2011); Wirata (2022)           |

**Sumber:** Disusun penulis berdasarkan Wahyunengseh (2011); M. S. Anwar (2022); Wirata (2022); Syamsiyah & Rizal (2023); Chairudin (2023); Justin Niaga Siman Juntak et al. (2023); Salehuddin et al. (2023); Nurjannah et al. (2023); dan Khoirin Nisa' et al. (2024).



## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sosial dalam bidang pendidikan di Indonesia memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerataan pendidikan melalui penguatan aksesibilitas pendidikan dan pendidikan inklusif. Aksesibilitas pendidikan berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin kesamaan kesempatan memperoleh layanan pendidikan melalui dukungan regulasi, penyediaan fasilitas, layanan, teknologi, dan penghapusan berbagai hambatan bagi seluruh peserta didik. Sementara itu, pendidikan inklusif merupakan implementasi kebijakan sosial yang menekankan penyelenggaraan pembelajaran yang menghargai keberagaman melalui penguatan kompetensi guru, pengembangan kurikulum yang adaptif, budaya sekolah yang inklusif, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan regulasi yang cukup kuat dalam mendukung aksesibilitas pendidikan dan pendidikan inklusif. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum optimalnya penerjemahan kebijakan ke dalam praktik operasional, keterbatasan infrastruktur dan fasilitas yang ramah disabilitas, belum meratanya kompetensi guru, keterbatasan modifikasi kurikulum, serta masih adanya stigma sosial dan budaya sekolah yang belum sepenuhnya inklusif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sosial tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaannya di tingkat satuan pendidikan.

Analisis bibliometrik memperlihatkan bahwa perkembangan penelitian mengenai pendidikan inklusif di Indonesia telah bergeser dari kajian yang bersifat normatif menuju kajian empiris yang lebih berorientasi pada implementasi, pengalaman peserta didik, kompetensi guru, strategi pembelajaran, dan berbagai hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Pergeseran ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas implementasi menjadi fokus utama dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa aksesibilitas pendidikan dan pendidikan inklusif merupakan dua dimensi yang saling melengkapi dalam implementasi kebijakan sosial untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan. Oleh karena itu, efektivitas implementasi kebijakan sosial memerlukan integrasi antara regulasi yang implementatif, penyediaan infrastruktur yang memadai, peningkatan kompetensi pendidik,



pengembangan kurikulum yang adaptif, pemanfaatan teknologi pendidikan, serta transformasi budaya sekolah yang menghargai keberagaman. Integrasi tersebut menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan pembangunan pendidikan nasional.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan akademik selama proses penyusunan penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada para peneliti dan penulis yang karya ilmiahnya menjadi sumber utama dalam kajian pustaka sehingga mendukung penyusunan sintesis konseptual pada penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada editor dan reviewer atas masukan yang konstruktif dalam penyempurnaan naskah ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adiwidjaja, I., Gani, A. J. A., Rozikin, M., Sujarwoto, & Suprojo, A. (2024). Implementation of Public Policy for Expanding Access to Basic Education as an effort to Increase School Enrollment Rates. *International Journal of Religion*, 5(11 SE-Articles), 1445–1459. <https://doi.org/10.61707/xkkwc409>
- Anwar, K. (2022). Implementasi dan Relevansi Kebijakan Dalam Pemerataan Pendidikan: Studi Literatur Pelayanan Publik. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 13(3), 419–428. <http://www.journal.ikopin.ac.id/index.php/coopetition/article/view/2496/2073>
- Anwar, M. S. (2022). Ketimpangan aksesibilitas pendidikan dalam perspektif pendidikan multikultural. *FOUNDASIA*, 13(1), 1–15. <https://journal.uny.ac.id/index.php/foundasia/article/view/47444/18489>
- Bangkara, B. M. A. S. A., Pattiasina, P. J., Fatmawati, E., Heryani, A., & Damayanto, A. (2022). Relevance of education policy and implementation in Indonesia: A study of the public service literature. *Linguistics and Culture Review*, 6(S5 SE-), 216–232. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6nS5.2156>
- Brown, P., & James, D. (2020). Educational expansion, poverty reduction and social mobility: Reframing the debate. *International Journal of Educational Research*, 100, 101537. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101537>
- Chairudin, M. (2023). KONSEP KEBIJAKANDAN PERENCANAAN STRATEGIS DALAM PENDIDIKAN. *JUPI: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 21(2), 204–215. <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/jipi/article/view/4103/2836>
- Chankseliani, M., & McCowan, T. (2021). Higher education and the Sustainable Development Goals. *Higher Education*, 81, 1–8. <https://doi.org/10.1007/s10734-020-00652-w>
- Dianastiti, F. E., Suwandi, S., & Setiawan, B. (2024). A Bibliometric Analysis of Inclusive Education in Indonesia: Achievement and its Relations to General Education. *INKLUSI*, 11(2 SE-Articles), 139–160. <https://doi.org/10.14421/ijds.110202>



- Ediyanto, Mahanani, P., Aprilia, I. D., & Wulandary, R. S. R. & V. (2024). Optimizing Inclusive Education: Uncovering Challenges and Strategies in Primary Schools Through a Literature Review. *Mimbar Sekolah Dasar*, 11(2), 385–395. <https://doi.org/https://ejournal.upi.edu/index.php/mimbar/article/view/71803>
- Genovesi, E., Ahmed, I., Ayele, M., Belay, W., Burningham, O., Chen, A., Girma2, F., Lakew7, L. T., , Charlotte Hanlon8‡, R., & Hoekstra, A. (2024). Exploring context for implementation of inclusive education for children with developmental disabilities in mainstream primary schools in Ethiopia. *PLoS ONE*, 19(8), e0307576. <https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pone.0307576>
- Hafidati, P. (2020). KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PENDIDIKAN DI INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN ORDE REFORMASI. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 5(1), 64–79. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/2372/1120>
- Ibourk, A., & Raoui, S. (2024). Inclusive education and school dropout of special needs students in Morocco: A spatial analysis. *Review of Education*, 12(1), e3453. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/rev3.3453>
- Jung, I., & Jung, I. (2022). The meaning of equality in education under Article 31 (1) of the Constitution. *Constitutional Law Research*, 28(3), 313–343. <https://doi.org/10.35901/kjcl.2022.28.3.313>
- Justin Niaga Siman Juntak, Alfredo Rynaldi, Eka Sukmawati, M. A., & Sukomardojo, T. (2023). Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua: Studi Implementasi Pendidikan Inklusif di Indonesia. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, 5(205–214). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ministrate/article/view/26904>
- Khoirin Nisa', S., Muntamah, B. S., & Nurdibyanandaru, D. (2024). STRATEGIES FOR STRENGTHENING THE CULTURE OF INCLUSION IN THE REALM OF EDUCATION IN INDONESIA. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 7(2 SE-Articles), 63–79. <https://doi.org/10.26740/inklusi.v7n2.p63-79>
- Leng, C. (2025). The Role of Higher Education in Promoting Social Mobility and Reducing Inequality. *Contemporary Education Frontiers*, 3(3), 70–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.18063/cef.v3i3.801>
- Li, J., & Zhang, Q. (2025). Economic development benefits or social inequality hinders? Intergenerational educational mobility in 49 countries. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 1–12. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-05687-x>
- Luthfi, A., Putra, W. P. I. M. A. W. W., Mawarni, & Iga, D. (2025). QUALITY EDUCATION IN ACHIEVING THE SDGS IN INDONESIA. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara*, 9(1), 175–190. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v9i1.6396>
- Madani, R. A. (2019). Analysis of Educational Quality, a Goal of Education for All Policy. *Higher Education Studies*, 9(1), 100–109. <https://doi.org/10.5539/hes.v9n1p100>
- Mandahu, T. (2025). Education and Social Mobility in Emerging Economies: A Review of Barriers and Opportunities. *International Journal of Social Science and Applied Technology*, 1(1), 22–29. <https://doi.org/10.64391/ijssat.v1i1.003>
- Marsetyo, F. D., & Nurhadi, N. (2021). Isomorphic Mimicry and Social Inclusion: an Analysis of the Capability of Wonosobo District Government in Implementing the Inclusive Education Policy. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 4(2), 283–318. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/jpm.2020.042-01>



- Michopoulou, K. (2025). The Principle of Equality in Education: Exploring the Legal Aspects of the Right to Inclusive and Equitable Quality Education for Achieving the Development of a Democratic Citizenship. *European Journal of Education and Pedagogy*, 6(2), 64–69. <https://doi.org/10.24018/ejedu.2025.6.2.940>
- Mintarsih, M., Abustan, A., & Gayo, A. (2022). Development and education human right based. *AMCA Journal of Education and Behavioral Change*, 2(2), 71–78. <https://doi.org/DOI> <https://doi.org/10.51773/ajeb.v2i2.190>
- Muhamad, A., & Rajab, W. G. (2025). An Investigation of the Implementation of Inclusive Education Policy in Central Uganda. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATION IN SOCIAL SCIENCE (IJRISS)*, IX(VI), 52–102. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.47772/IJRISS.2025.90600005>
- Nur Asyikin, Wulan Rafelia, & Ika Kurnia Sofiani. (2025). The Role Of Technology In Equitable Education: Policy Analysis And Implementation Challenges In Indonesia. *Public Service: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1 SE-Articles), 1–14. <https://doi.org/10.61166/service.v2i1.6>
- Nurjannah, S., Azizah, N., & Rosi, F. (2023). Modification Curriculum in Inclusive Setting: A Systematic Literature Review. *JPK (Jurnal Pendidikan Khusus)*, 19(2 SE-Articles), 109–120. <https://doi.org/10.21831/jpk.v19i2.80808>
- R Madhakomala, Putri Puspita Ayu, Tika Septiani, & Parulian Halomoan Butarbutar. (2025). Education for All: A Systematic Analysis of Equity Policies and Challenges in Indonesia. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 4(4 SE-Education). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v4i4.1453>
- Rengganis, G. P., & Purbaningrum, D. G. (2024). Implementasi Kebijakan Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Di Universitas Muhammadiyah Jakarta. *Jurnal Media Administrasi*, 9(1), 27–40.
- Rini, T. A., & Azizah, N. (2024). Students' Perspectives on Inclusive Education in Indonesia: Insights from a Systematic Literature Review. *Indonesian Journal of Educational Research and Review*, 7(2 SE-Articles), 455–466. <https://doi.org/10.23887/ijerr.v7i2.79002>
- Salehuddin, Oruh, S., Agustang, A., & Maswati, R. (2023). Inklusi Pendidikan Dan Dinamika Kebudayaan Lokal Di Papua. *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(2), 1413–1424. <http://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/ES/article/view/1718/941>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (29th ed.). Alfabeta.
- Syam, R. S. El, & Fuadi, S. I. (2023). Inklusifitas Sekolah Sasaran Program Kampus Mengajar pada SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Wonosobo. *Intellektika : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(5), 284–296. <https://doi.org/10.59841/intellektika.v1i5.635>
- Syamsiyah, S. F., & Rizal, T. M. (2023). AKSESIBILITAS PENDIDIKAN TINGGI PENYANDANG DISABILITAS DI UNIVERSITAS PGRI ARGOPURO JEMBER. *SPEED Journal : Journal of Special Education*, 7(1), 55–75. <https://jurnal.unipar.ac.id/index.php/speed/article/view/1214>
- Tawa, A. B. (2019). KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA PADA SEKOLAH DASAR. *SAPA Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 4(2), 107–117. <https://e-journal.stp-ipi.ac.id/index.php/sapa/article/view/82>
- Ticona Machaca, A., Cano Ccoa, D. M., Gutiérrez Castillo, F. H., Quispe Gomez, F., Arroyo Beltrán, M., Zirena Cano, M. G., Sánchez-Chávez-Arroyo, V., Manrique



- Chavez, C. P., Romualdo Rosario, A., Adauto-Medina, W. A., & Montes Salcedo, M. (2025). Public Policy for Human Capital: Fostering Sustainable Equity in Disadvantaged Communities. In *Sustainability* (Vol. 17, Issue 2, p. 535). <https://doi.org/10.3390/su17020535>
- Tintingon, J. Y., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Problematika dan Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educatio*, 9(2), 798–809. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/educatio/article/view/5088/2973>
- Todapa, D. T. (2024). Evaluation of state administration performance in improving access to education in rural areas of Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(2), 738–745. <https://doi.org/https://doi.org/10.29210/020244078>
- Valdivia-Vizarreta, P., Carrera-Fossas, E., Sala Torrent, M., & Planas, A. (2025). Balancing individual and community dimensions: educators' narratives on youth empowerment. *Education + Training*, 67(7), 737–751. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/ET-05-2024-0244>
- Wahyunengseh, R. D. (2011). Membangun Kepercayaan Publik Melalui Kebijakan Sosial Inklusif. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 15(1), 29–40. <https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10923/8164>
- Widiastuti, K. (2025). Assessing the Impact of Education Policies in Indonesia: Challenges, Achievement, and Future Direction. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 17(2), 1955–1964. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v17i2.6803>
- Wirata, G. (2022). *KEBIJAKAN SOSIAL KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN* (Cetakan pe). Penerbit CV. Pena Persada. [http://repo.unr.ac.id/705/1/KEBIJAKAN\\_SOSIAL\\_GEDE\\_WIRATA.pdf](http://repo.unr.ac.id/705/1/KEBIJAKAN_SOSIAL_GEDE_WIRATA.pdf)